



Kebijakan Pemerintah Filipina dalam Menangani Ancaman Gerakan *Moro Islamic Liberation Front*

Aunur Rafiq MS

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The issue of terrorism and separatism are common in recent years. Both problems can arise because of radical thinking that develops within a group. Moro Islamic Liberation Front (MILF) is one example of groups related to terrorism and separatism. The group wants to form its own state or independent from the Philippines, which then leads to conflict between the Philippines and MILF. The existence of cooperation that is established with several terrorist groups expose threats in the form of physical or thought. The Philippine Government has issued several policies that are expected to resolve the conflict with the MILF. This study aims to understand how the policies undertaken by the Philippines in resolving conflicts with the MILF. This research uses constructivism paradigm and problem solving theory with qualitative method. From the research that has been done, it is known that the Philippines uses the method of hard approach and soft approach in order to solve the problem. However, the soft approach method is more often used in terms of negotiation and mediation. This proves the Philippines has applied the value of democracy to deal with the problem.

Keywords: terrorism, separatism, national policy, conflict resolution

Pendahuluan

Pemikiran radikalisme dengan latar belakang agama telah berkembang saat ini di beberapa kawasan negara, seperti halnya di Negara Filipina. Negara ini memiliki angka kegiatan kriminalisme yang ada hubungannya dengan pemikiran radikal seperti terorisme dan separatisme yang tinggi di kawasan Asia Tenggara. Salah satu kelompok yang memiliki pemikiran radikal diantaranya adalah Moro Islamic Liberation Front (MILF). MILF merupakan salah satu gerakan separatis yang berada di Filipina. Gerakan separatis ini berpusat di Mindanao, bagian selatan Filipina. MILF berusaha untuk memperjuangkan pembangunan daerah otonomi Islam di wilayah Filipina. Instruksi perlawanan yang dilakukan oleh gerakan separatis ini sesuai dengan instruksi pandangan jihad yang mereka percaya. Gerakan MILF memiliki anggota sekitar 11.000-12.000 orang (Luga, 2002:46).

Pemikiran radikal yang digunakan oleh gerakan ini juga dipengaruhi oleh pemikiran radikal yang berkembang dari timur tengah. Hal ini dibuktikan dengan adanya kerjasama yang dilakukan oleh gerakan MILF ini dengan jaringan Al Qaeda, jaringan terorisme yang berasal dari timur tengah. MILF memberikan tempat camp pelatihan yang digunakan oleh Al Qaeda untuk melakukan kegiatan latihan militer, dilain pihak MILF mendapatkan beberapa bantuan berupa tambahan dana dan senjata yang digunakan dalam melakukan aksi perlawanan. Gerakan MILF dari tahun 2004-2013 telah melakukan aksi sebanyak 141 kasus. Penyerangan yang dilakukan oleh gerakan MILF ini berupa penyerangan secara militer, tindakan penculikan, dan pengeboman. Beberapa serangan

yang dilakukan oleh gerakan ini juga telah terbukti memiliki keterlibatan dengan jaringan terorisme lainnya, seperti ASG, JI, dan Al Qaeda (<http://www.start.umd.edu/gtd/>).

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dan teori *problem solving* dengan metode kualitatif. Kebijakan yang telah dilakukan oleh Filipina akan dilihat dari segi teori *problem solving*, mulai identifikasi masalah, pemilihan tindakan dalam penanganan permasalahan, pemecahan masalah, dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Berdasarkan pemilihan kebijakan, Filipina menggunakan pendekatan secara militer maupun secara mediasi atau perundingan. Konstruktivisme dilihat untuk memberikan penjelasan Filipina sebagai negara yang demokrasi dalam penanganan kebijakan untuk digunakan nantinya dalam proses penyelesaian konflik.

Pembahasan

Penelitian yang dilakukan diawali dengan penjelasan mengenai sejarah konflik yang ada di daerah Mindanao, Filipina selatan. Kemudian dilanjutkan mengenai terbentuknya MILF, ideologi dan tujuan yang ingin dicapai kelompok tersebut, bahkan juga dijelaskan mengenai sistem politik yang digunakan kelompok tersebut. Hal ini mengungkapkan tujuan untuk memisahkan diri dari Filipina, atau untuk membuat negara sendiri yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam rangka mencapai tujuannya, MILF juga memberikan perlawanan terhadap Negara Filipina dalam bentuk aksi militer dan ada tindakan mediasi kedua pihak untuk mengupayakan suara-suara kelompok tersebut agar didengar oleh Pemerintah Filipina.

Hashim Selamat yang menjadi pemimpin pertama kelompok tersebut menyerukan untuk berjuang dengan cara jihad Islam yang berasal dari timur tengah. Hal ini disebabkan karena banyaknya para petinggi kelompok tersebut yang berasal dari timur tengah untuk menimba ilmu. Kedekatan yang dijalin antara beberapa petinggi, salah satunya adalah Hashim Selamat dengan para terorisme di Al Qaeda dibuktikan adanya kerjasama MILF dan Al Qaeda dalam bidang militer dan juga dana untuk keperluan perjuangan atau perlawanan. Kamp pelatihan yang ada di daerah MILF digunakan oleh pejuang Al Qaeda untuk latihan militer sementara timbal balik yang didapat adalah MILF mendapatkan senjata dan dana dalam proses perlawanan dengan Filipina.

Aksi perlawanan yang dilakukan kelompok MILF tidak hanya dilakukan dengan perlawanan baku tembak secara langsung dengan Pemerintah Filipina, akan tetapi juga ada kegiatan penculikan, dan bahkan pengeboman. Peristiwa pengeboman yang terjadi contohnya adalah pengeboman yang terjadi di Bandara Davao, Polisi Filipina mengatakan bahwa yang bertanggung jawab dalam peristiwa pengeboman tersebut adalah MILF dan Abu Sayyaf Group. ASG adalah kelompok terorisme yang berkonsentrasi di daerah Mindanao yang memiliki ikatan langsung dengan Al Qaeda. Hal inilah yang menimbulkan kekhawatiran apabila aksi ini dilakukan terus menerus akan makin banyak membawa korban sipil tidak bersalah yang menjadi target sasaran mereka.

Pasca meninggalnya Hashim Selamat pada tahun 2003 dan digantikan oleh Al Haj Murad Ibrahim, gerakan MILF mulai bertransformasi yang semula menggunakan cara jihad dan pandangan radikal dalam setiap perlawanannya menjadi lebih moderat dan nasionalis. Hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan intensitas konflik antara kedua pihak dibandingkan periode sebelumnya. Selain itu, metode yang digunakan dalam penyelesaian konflik kedua pihak menggunakan cara mediasi atau dengan perundingan. Hal ini dilakukan karena kedua pihak merasakan banyaknya kerugian yang diakibatkan, dari banyak orang meninggal dan juga orang kehilangan tempat tinggalnya.

Ideologi yang dimiliki oleh MILF yaitu menolak identitas dan ideologi yang dianut oleh Filipina, membawa kelompok ini ke dalam konflik frontal dengan pemerintah. Hal ini dijelaskan bahwa keinginan kelompok MILF melepaskan diri dari Filipina, dan juga mendirikan daerah yang otonomi dan sesuai ajaran Islam. Lebih lanjut, pemikiran ini

mengarahkan pada prinsip keinginan nasionalis dan wilayah yang satu karena perbedaan agama yang dimiliki antara Bangsamoro dan mayoritas warga Filipina yang berbeda. Pelepasan wilayah merupakan tujuan utama yang diinginkan daripada saling membagi kekuatan dengan Pemerintah Filipina. (Ramakrishna, and Tan. Eds, 2003:112)

Permasalahan awal yang muncul adalah ketidakpuasan para pihak MILF terhadap hasil atau pendapat yang dinyatakan oleh pemerintah dalam Perjanjian Tripoli. Dengan adanya *influence* atau pengaruh dari Timur Tengah dalam setiap aspek kegiatan yang dilakukan baik politik, agama, dan juga penggunaan senjata dikhawatirkan gerakan ini akan terpengaruh oleh gerakan radikal yang ada di Timur Tengah. Perhatian pemerintah Filipina tertuju pada MILF setelah adanya kerjasama yang terjalin antara beberapa jaringan terorisme Timur Tengah dan MILF dengan adanya pelatihan dan pendirian kamp bersama di daerah Mindanao.

Kurangnya pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Filipina pada saat terbentuknya gerakan MILF sampai dengan tahun 1996 karena faktor lain, yaitu fokus utama pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan dengan gerakan MNLF. Pada tahun 1996, Pemerintah Filipina dan gerakan MNLF melakukan perjanjian perdamaian pada saat masa jabatan Presiden Ramos, dan dalam perjanjian damai tersebut juga hadir perwakilan dari pihak MILF. Pasca peristiwa tersebut, kedua pihak melalui pemimpinnya pada saat itu, Hashim Salamat berupaya untuk membangun perdamaian dengan mengadakan beberapa perbincangan. (Santos, 2005:6)

Selama periode 1996-2000 sebelum terjadinya konflik senjata, kedua pihak telah menjalani serangkaian perjanjian termasuk dalam menjalin komunikasi, pengakuan, dan resolusi yang totalnya berjumlah 39. Beberapa di antaranya telah berhasil untuk mengimplementasikan gencatan senjata yang kemudian mendirikan komite gencatan senjata, kelompok pekerja teknis, reposisi dan penarikan mundur pasukan, dan lainnya tentang keamanan. Akan tetapi, pihak MILF tidak mengeluarkan resolusi mengenai isu substantif. (Santos, USIP special report, 2004: 5)

Filipina yang sebagai negara tentu saja tidak menginginkan adanya perpisahan wilayah Mindanao dari wilayah kekuasaan mereka. Perlawanan yang dilakukan oleh pemerintah melalui konflik militer dan juga mengundang kelompok MILF untuk bernegosiasi guna mendengarkan keinginan mereka. Kekhawatiran Pemerintah Filipina dengan adanya kerjasama yang dilakukan oleh MILF dan juga beberapa kelompok terorisme internasional lainnya adalah apabila paham radikal ini yang digunakan oleh terorisme internasional seperti Al Qaeda makin memberikan ancaman bagi negara tersebut. Sejak adanya ketetapan “war on terror” pada tahun 2000 yang diserukan oleh Amerika Serikat, Filipina juga menunjukkan keinginannya dan keseriusannya untuk melawan kegiatan terorisme di dunia.

Menurut pandangan dari Hugh Miall yang mengemukakan tentang konsep analisa konflik “*international conflict society*”, faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya konflik dapat dibagi ke dalam beberapa klasifikasi yaitu *global, regional, state, conflict party, individu*. Pertama, faktor global. Perkembangan kelompok Islam ekstrim di kawasan Timur Tengah menjadi faktor penyebab dorongan kelompok MILF untuk melakukan penyerangan. Adanya hubungan yang terjalin dengan beberapa organisasi radikal, yaitu Al Qaeda menyebabkan MILF berani menentang negara Filipina. Keinginan mereka untuk sama-sama mendirikan negara Islam menjadi landasan bersama bagi mereka untuk melakukan kerjasama.

Kedua, faktor regional. Keadaan wilayah regional yang saat itu sedang banyak berkembang kelompok ekstrimis lain, contohnya adalah jemaah Islamiyah yang berbasis di wilayah Indonesia juga menjadi motivasi berkembangnya kelompok MILF ini untuk menyerukan perlawanan terhadap pemerintah. Persamaan tujuan yang menginginkan

mendirikan kekhalifahan di wilayah masing-masing menyebabkan adanya hubungan yang terjalin dengan kedua kelompok ini.

Ketiga, faktor Negara. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah di antaranya merupakan penyebab terjadinya konflik dengan kelompok MILF, yaitu pemindahan beberapa penduduk Kristen Filipina di daerah Mindanao. Diketahui daerah ini adalah daerah mayoritas Muslim sehingga warga Muslim moro menganggap pemindahan penduduk ini akan membahayakan entitas Muslim moro sehingga muncul perlawanan rakyat Moro terhadap kebijakan yang diambil oleh Filipina.

Keempat adalah faktor pihak yang berkonflik. Kelompok etnis Muslim di Moro merasakan adanya ancaman terhadap kehadiran kelompok Kristen di Mindanao. Hal ini disebabkan karena kelompok Muslim Moro merupakan etnik minoritas di wilayah Filipina sehingga muncul perasaan khawatir akan diskriminasi dari rakyat Kristen Filipina. Sehingga hal ini mengakibatkan munculnya perlawanan bangsamoro untuk melepaskan diri dari Negara Filipina dan sekaligus mendirikan daerah dengan Islam sebagai ideologinya.

Terakhir, faktor individu. Kelompok MILF yang menjadi kelompok radikal disebabkan karena Hashim Salamat memiliki hubungan dengan kelompok terorisme Al Qaeda. Hal ini dibuktikan dengan latar belakang Salamat yang menempuh pendidikan di Timur Tengah, adanya pengiriman pasukan MILF ke Afghanistan pada saat perang dengan Uni Soviet juga menjadi bukti hubungan kedua kelompok tersebut, sebagai gantinya MILF mendapatkan pasokan dana dan senjata.

Pada masa tahun 2001-2012 telah tercapai beberapa kesepakatan yang menunjukkan perkembangan yang positif dalam mewujudkan kondisi damai pada konflik dua belah pihak. dibandingkan dengan periode sebelum tahun 2000, dua belah pihak sering gagal untuk melakukan perundingan. Dalam melakukan pembicaraan dengan pihak MILF, Pemerintah juga memperhatikan akibatnya terhadap situasi dan kondisi yang ada di publik. Kebijakan publik ini sangat berpengaruh terhadap posisi suatu negara dalam menghadapi permasalahan. Dalam hal ini Pemerintah Filipina berusaha bersikap netral dengan tidak memihak kepada rakyat Islam atau rakyat Kristen yang ada di Mindanao, sehingga dapat menyelesaikan konflik secara damai dan menjaga agar tidak tumbuh konflik yang baru di daerah Mindanao. Rangkaian proses penyelesaian konflik juga harus diatur, dan disusun secara hati-hati sehingga tidak jarang apabila penyelesaian konflik membutuhkan waktu yang cukup lama.

Proses penyelesaian konflik kedua belah pihak terdapat beberapa permasalahan yang timbul sehingga mengakibatkan kurang efektifnya proses perdamaian di kedua belah pihak. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan yang mencolok dalam memberikan saran, masukan, dan kebijakan kedua pihak. Pada dasarnya hal ini disebabkan karena masing-masing pihak bersikukuh untuk mencapai tujuan masing-masing tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Filipina yang berupaya untuk melindungi dan mengamankan daerahnya dari perpecahan tidak sejalan dengan tujuan MILF yang menginginkan lepas dari wilayah Filipina dan menginginkan daerah otonomi yang mandiri. (Caculitan, 2005:64)

Pengertian mengenai ide atau pemikiran, kemudian struktur, dan makna ini dapat terlihat pada masa awal mula konflik, hingga mengadakan perundingan – perundingan yang dilakukan masing-masing pihak dalam upayanya menemukan penyelesaian konflik. Pemikir konstruktivis melihat fenomena sosial sebagai suatu interaksi antar manusia atau kelompok. Ide ini juga dapat berubah seiring dengan pemahaman mereka mengenai interaksi yang terjadi di dalam komunitas masyarakat tersebut. Adanya upaya untuk melakukan perlawanan dikarenakan adanya diskriminasi begitupun juga dapat timbul

pemikiran untuk menyelesaikan konflik karena adanya hubungan atau interaksi yang mendasari.

Untuk memahami pola hubungan internasional diperlukan pemahaman mengenai identitas suatu pihak, kelompok atau individu dalam menempatkan dirinya terhadap suatu fenomena yang terjadi. Langkah ini merupakan langkah penting bagi para konstruktivis untuk dapat memahami identitas suatu pihak atau kelompok untuk dapat menjelaskan dan mengerti bagaimana pemikiran suatu pihak terhadap fenomena yang terjadi yang datang saat ini, sekarang, atau di masa mendatang. Dengan memahami identitas, pola dasar yang digunakan oleh negara, maka akan menjadi mudah dalam memahami dan mengerti penjelasan mengenai sikap terhadap suatu fenomena. Tidak hanya itu, hal ini juga memungkinkan penjelasan bagi aktor negara, atau kelompok, dalam hal ini adalah identitas kelompok MILF.

Pola hubungan yang terjadi di antaranya beberapa pihak inilah yang menjadi dasar berpikir konstruktivis, interaksi yang terjadi antara pihak yang terkait inilah yang memberikan pemahaman terhadap struktur identitas dan kepentingan suatu pihak. (Wendt, 1992:394) Dalam konflik MILF dan Pemerintah Filipina dapat diketahui identitas masing-masing pihak melalui kebijakan yang mereka lakukan baik dalam langkah tujuan, dan pola perilaku.

Identitas yang seperti telah dijelaskan sebelumnya merupakan bentukan atau hasil dari pemikiran, struktur, dan makna. Dalam konflik ini, MILF dan Pemerintah Filipina sama-sama memiliki identitas masing-masing. Pendekatan yang dilakukan adalah pemahaman mengenai identitas Filipina sebagai sebuah negara dan MILF memiliki identitas sebagai kelompok separatistis. Adanya persepsi identitas yang berbeda inilah yang menyebabkan lahirnya konflik, dan upaya untuk menyelesaikan konflik kadang terhambat. Filipina mempertahankan identitasnya sebagai sebuah negara untuk mempertahankan wilayah kedaulatannya, dan disisi lain MILF berupaya untuk mencapai identitasnya sebagai suatu wilayah yang merdeka dan bebas dari Filipina.

Tentu kita bisa melihat perbedaan identitas disini kita akan memahami pemikiran yang berbeda masing-masing pihak. Sebagai negara, tentunya Filipina menginginkan wilayahnya tetap aman dan tidak wilayahnya yang lepas dari kekuasaannya. Identitas sebagai negara mengharuskan pemerintah untuk lebih memahami faktor penyebab konflik, mencari cara agar konflik ini tidak sampai pada pemisahan wilayah Mindanao dari wilayah kesatuan Filipina. Beberapa langkah kebijakan yang diambil oleh Filipina seharusnya tidak hanya melihat pada satu sisi saja, melainkan harus melihat dari dua sisi, yaitu dari persepsi MILF mengenai konflik ini.

Konstruktivisme mempercayai adanya aturan internasional atau norma internasional sebagai landasan dalam hubungan internasional. Norma internasional yang berisikan ketetapan, aturan dalam melakukan interaksi hubungan internasional yang diaplikasikan pada kasus konflik MILF dan Filipina ini menjadikan kebijakan Filipina sejalan dengan aturan-aturan yang ada dalam ketetapan internasional. Penyelesaian konflik dilakukan dengan bantuan pihak lain, yaitu Negara Libya, Malaysia, dan Amerika Serikat, dan adanya beberapa organisasi yang menjadi pembantu dalam proses perdamaian.

Sistem pemerintahan di Filipina yang menggunakan sistem demokrasi menghendaki untuk sistem pemerintahan yang terbuka, dalam arti negara memberikan kebebasan untuk berpendapat. Konsep dari demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, seperti pendapat yang dinyatakan oleh John. F Kennedy tentang demokrasi adalah pemerintahan itu berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Sistem demokrasi ini memberikan hak bagi rakyat untuk mengeluarkan pendapat dan memberi kewenangan bagi rakyat untuk ikut berkontribusi dalam sistem pemerintahan, karena dalam konsep demokrasi hak asasi manusia dijunjung tinggi.

Filipina sebagai negara demokrasi yang telah terbentuk sistemnya dari beberapa tahun setelah kemerdekaan telah membentuk struktur negara yang memikirkan kepentingan rakyat dan memberikan kewenangan dari rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa dan bernegara. Permasalahan di negara tentu saja menjadi tanggung jawab bagi semua elemen negara untuk dapat menyelesaikan permasalahan. Dalam kasus MILF dan Pemerintah Filipina dibutuhkan dua sudut pandang yang diambil guna mendapatkan kata sepakat dalam mencapai perdamaian.

Struktur demokrasi yang ada di Filipina membuat negara mau untuk melakukan perundingan dengan MILF. Cara pendekatan secara halus (*soft approach*) ini dilakukan karena Bangsamoro yang ada di wilayah Mindanao masih menjadi warga negara Filipina dan karenanya negara wajib mendengarkan, dan mencari solusi bagi keinginan warganya. Meskipun keinginannya untuk memisahkan diri dari Filipina, negara setidaknya harus mencari cara agar Bangsamoro berkenan untuk menyelesaikan konflik kedua pihak dan menjalin perdamaian dengan pemerintah.

Sebagai negara yang berdemokrasi tentu saja kondisi sosial seperti ini harus diperhatikan, menekan penyelesaian konflik dengan keuntungan kedua pihak memang tidak mudah namun tetap harus dilakukan. Perundingan yang dilakukan oleh kedua pihak merupakan langkah terbaik yang dipilih Filipina, hal ini dilandasi dengan melihat kekuatan militer kelompok MILF yang jumlah mencapai ribuan personel. Diikuti dengan bentrok senjata antara kedua pihak yang menimbulkan kerugian yang *massive*. Pertimbangan yang harus dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan pendekatan secara halus, penyelesaian permasalahan dengan perundingan, dan negosiasi.

Mengacu pada teori problem solving, tentang upaya menyelesaikan permasalahan dilalui dalam beberapa tahapan. Pertama, tahap **identifikasi masalah**. Dalam hal ini identifikasi permasalahan tentang pemberontakan yang dilakukan oleh MILF, melakukan pengamatan terhadap penyebab munculnya pemberontakan oleh kelompok tersebut. Telah diketahui bahwa penyebab adanya perasaan diskriminasi yang diterima oleh penduduk Muslim Mindanao. Hal ini menjadi awal mula untuk mengambil langkah atau kebijakan Pemerintah Filipina. Permasalahan ini menjadi ancaman nasional karena menyangkut tentang keamanan wilayah negara.

Sesuai dengan persepsi bahwa negara harus mampu untuk mengantisipasi adanya ancaman baik yang berasal dari dalam ataupun berasal dari luar. Ancaman kedaulatan ini bukanlah ancaman yang murni datang dari luar, karena aktivitasnya ada dalam wilayah domestik negara tersebut. Namun, tetap saja hal ini termasuk dalam ancaman internasional dikarenakan ancaman terhadap suatu negara merupakan permasalahan internasional. Terlebih lagi, adanya keterikatan pihak lain diluar wilayah Filipina yang terbukti memberikan bantuan operasional kelompok MILF.

Kedua, tahap **pemilihan tindakan dalam penanganan permasalahan**. Dikarenakan pemahaman permasalahan seperti itu, pastinya memerlukan pendekatan yang hati-hati untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, karena ancaman yang ditimbulkan menyangkut ancaman kedaulatan wilayah negara. Hal yang lain yang menjadi perhatian adalah ingin mengganti ideologi atau pedoman hidup dalam suatu wilayah di suatu negara. Kembali lagi pada konsep pemikiran milik konstruktivis, ide atau pemikiran adalah hal yang paling utama.

Untuk menanggulangi ancaman kelompok MILF, harus menggunakan langkah yang hati-hati, hal ini bertujuan tidak hanya menghentikan pemberontakan, akan tetapi juga memberikan pemahaman terhadap nasionalisme. Negara tentunya tidak akan membiarkan warga negaranya mengalami perpecahan seperti ini, pemilihan langkah dan pendekatan dalam mencapai kesepakatan penyelesaian konflik menggunakan cara tidak hanya melalui *hard approach*, akan tetapi juga menggunakan *soft approach*. Hal ini

dibuktikan dengan langkah Filipina yang mengadakan perundingan dengan kelompok MILF untuk bersama-sama menyelesaikan konflik dan menciptakan perdamaian di Mindanao.

Ketiga, tahap **pemecahan masalah**. Dalam hal ini, aspek pemecahan masalah diartikan sebagai cara yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik. Hal ini dapat dibuktikan dari kebijakan Filipina yang mengundang MILF untuk berdiskusi dan mendengarkan apa yang menjadi tuntutan mereka. Dalam proses perundingan tidak hanya melihat dalam satu sisi, melainkan harus dilihat dari keduanya. Pola pemecahan masalah seperti ini dilakukan untuk mendapatkan solusi yang menguntungkan kedua pihak (*win-win solution*).

Dilihat dari hasil perundingan yang menyatakan bahwa Filipina menyetujui keinginan masyarakat Mindanao untuk mendapatkan kewenangan dalam mengelola daerahnya sendiri, namun Filipina tidak menyetujui apabila Mindanao harus melepaskan diri dari kesatuan Negara Filipina. Hal ini kemudian disetujui oleh kelompok MILF yang mengharapkan daerah otonomi bagi Bangsamoro atau rakyat Muslim di Mindanao. Pemecahan masalah dalam hal ini tidaklah melalui pendekatan militer semata, melainkan juga perlu diadakannya pendekatan secara halus untuk menemukan kesepakatan sehingga perdamaian dapat diciptakan.

Keempat, **memperoleh hasil yang diinginkan**. Tentu saja hasil yang diinginkan dalam kebijakan tersebut tidak hanya menyelesaikan konflik saja, akan tetapi juga menciptakan perdamaian di antaranya kedua pihak. Melalui tiga cara sebelumnya ini menjadi bukti bahwa penyelesaian konflik tidaklah semudah, akan tetapi memerlukan langkah yang seksama dengan waktu yang tidak singkat. Karena konflik ini menyangkut dengan pemikiran atau langkah-langkah beberapa kelompok terhadap suatu ideologi negara. Perdamaian akan dapat tercipta apabila kedua pihak sama-sama sepakat untuk membentuknya, hal itu didasarkan pada itikad baik, dan kesadaran masing-masing pihak.

Gerakan MILF yang semula disebut sebagai kelompok terorisme dikarenakan metode aksi dan hubungannya dengan organisasi terorisme internasional, akan tetapi status atau identitas yang dimiliki oleh MILF ini tidak bertahan lama setelah pemerintah menghilangkan status kelompok terorisme terhadap MILF. Hal ini berkaitan dengan pernyataan perwakilan gerakan tersebut dengan tidak memiliki hubungan dengan organisasi terorisme tersebut. Dengan pernyataan tersebut, maka kebijakan yang diambil oleh Filipina berubah dari kebijakan sebelumnya yang menghendaki bahwa MILF adalah kelompok terorisme. Sebagai langkahnya adalah berusaha mengadakan perundingan dengan kelompok MILF menciptakan perdamaian bersama.

Kesimpulan

Dalam menyelesaikan konflik tersebut perlu adanya tahapan yang harus diperhatikan demi mencapai kata perdamaian. Mengacu pada teori problem solving dapat dikategorikan dalam beberapa langkah yaitu, identifikasi masalah, pemilihan tindakan, dan pemecahan masalah. Hal ini perlu diperhatikan dikarenakan pengambilan kebijakan dengan hati-hati dan melalui proses yang seksama akan lebih membawa keberhasilan mencapai perdamaian.

Oleh karena terdapat beberapa faktor tersebut, Pemerintah Filipina dalam mengambil kebijakan mengacu pada identitas diri Filipina, norma internasional, dan struktur seperti yang terdapat dalam konstruktivisme. Bentuk pemerintahan Filipina yang demokrasi, memberikan kesempatan bagi kelompok MILF untuk mengatakan keinginannya sesuai dengan konsep aspirasi rakyat. Pemikiran radikal yang berkembang dalam kelompok MILF menjadi ancaman bagi proses perdamaian dan penyelesaian konflik, deradikalisasi menjadi langkah penting bagi penyelesaian konflik kedua pihak.

Kebijakan internasional tentang war on terror juga menjadi acuan dalam mengambil kebijakan menyelesaikan konflik, Pemerintah Filipina mengacu dari *The Criminal Code of the Philippines* tentang aturan yang berlaku dalam kebijakan kasus separatisme.

Referensi

- Luga, Alan R. (2002). *“Muslim Insurgency in Mindanao, Philippines”*. Faculty of the U.S. Army Command and General Staff College. Kansas
- Study of Terrorism and Responses to Terrorism. (2015). Online. *“Moro Islamic Liberation Front.”* (www.start.umd.edu). Diunduh pada 1 Desember 2015
- Ramakrishna, Kumar. and Tan, See S. eds. (2003). *“After Bali: The Threat of Terrorism in Southeast Asia”*. World Scientific.
- Santos, Soliman M, Jr. (2005). *“Delays in the Peace Negotiations between the Philippines Government and the Moro Islamic Liberation Front: Causes and Prescriptions”*. East-West Center. Washington.
- Santos, Soliman. (2004). "Dynamics and directions of the peace negotiations between the Philippine government and the Moro Islamic liberation front." *Quezon City* 6.
- Miall, Hugh. (2004). *“Conflict Transformation: A Multi Dimensional Task”*. Berghof Research Center for Constructive Conflict Management.
- Caculitan, Ariel R. (2005). *“Negotiating Peace With The Moro Islamic Liberation Front in The Southern Philippines”*. Naval Post Graduate School. California.
- Wendt, Alexander. (1992). *“Anarchy is what states make of it: the social construction of power politics. International organization,”* 46 (02), 391-425.